

**MUNCUL DAN PERKEMBANGANNYA SURAT KABAR PIKIRAN
RAKYAT SAMPAI AWAL ORDE BARU DI BANDUNG (1950-1974)**

e-journal

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra



Oleh:

Ramdhan Budi Prastowo
11407144025

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

The Emergence and Development of the Pikiran Rakyat Newspaper Until The Beginning Of The New Order in Bandung (1950-1974)

By:

Ramdhan Budi Prastowo

11407144025

ABSTRACT

The development of the press goes parallel to the political developments that exist in the Government. The press began to develop into a means of organization in line with the national movement in Indonesia. The city of Bandung is a city whose political life is quite important, and influential to the newspaper, one of which is Pikiran Rakyat. Daily appearance of the mind also makes it as a political medium that broadcast the content of political news and do criticism and control of government policy. This function has an impact on the development of Pikiran Rakyat newspaper led by Sakti Alamsyah. This thesis aims to know the journey of Pikiran Rakyat and developments in 1950-1974.

This study uses critical historical research methods. First, the heuristics that are the stage of collecting data or relevant historical sources. Second, source criticism is the stage of assessment of the authenticity and credibility of sources obtained from the physical and the source content. Third, the interpretation is by looking for relevance of the relationship between the facts that have been obtained so that more meaningful. Fourth, historiography or writing is the delivery of synthesis in the form of historical work.

The results of this study indicate that the development of the newspaper Pikiran Rakyat that occurred in 1950-1974 influenced by political circumstances. The development of the Pikiran Rakyat newspaper was seen with a censure of criticism against the government through mass media in the 1950s. At the beginning of 1966, the press activity of the Pikiran Rakyat newspaper was stopped due to the late affiliation of politics so that its press activities were dismissed by the government. But on March 24, 1966 at the instigation of the Siliwangi Commander, the journalists represented Sakti Alamsyah who was the leader of Pikiran Rakyat agreed to cooperate to publish the West Java Armed Forces Edition newspaper. But not even a year of this newspaper published Ministry of Information revoked the rules about the political affiliation.

Keywords: *Bandung, newspaper, Politic*

Muncul dan Perkembangannya Surat Kabar Pikiran Rakyat Sampai Awal Orde Baru di Bandung (1950-1974)

Oleh:

Ramdhan Budi Prastowo

11407144025

ABSTRAK

Perkembangan pers berjalan sejajar dengan perkembangan politik yang ada di Pemerintahan. Pers mulai berkembang menjadi sarana organisasi sejalan dengan pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kota Bandung merupakan kota yang kehidupan politiknya cukup penting, dan berpengaruh kepada surat kabar, salah satunya yaitu Pikiran Rakyat. Kemunculan Harian Pikiran Rakyat juga menjadikan sebagai media politik yaitu menyiarkan isi berita politik dan melakukan kritik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Fungsi tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan surat kabar pikiran rakyat yang dipimpin oleh Sakti Alamsyah. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui perjalanan Pikiran Rakyat dan perkembangan pada tahun 1950-1974.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna hubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan surat kabar Pikiran rakyat yang terjadi pada tahun 1950-1974 dipengaruhi oleh keadaan politik. Perkembangan surat kabar Pikiran Rakyat terlihat dengan muatan berita kritikan terhadap pemerintah melalui media massa pada tahun 1950-an. Pada awal tahun 1966, kegiatan pers surat kabar Pikiran Rakyat sempat terhenti disebabkan terlambatnya berafiliasi terhadap perpolitikan sehingga kegiatan persnya diberhentikan oleh pemerintah. Namun tanggal 24 Maret 1966 atas dorongan Pangdam Siliwangi para wartawan yang di wakili Sakti Alamsyah yang merupakan pimpinan Pikiran Rakyat sepakat untuk melakukan kerjasama untuk menerbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat. Namun belum genap setahun surat kabar ini terbit Kementerian Penerangan mencabut kembali peraturan tentang berafiliasi dengan perpolitikan.

Kata kunci: *Bandung, Surat kabar, Politik*

A. PENDAHULUAN

Istilah pers sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *press* dapat mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi melancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang dan sekelompok orang kepada orang lain.¹ Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.² Sementara itu, dalam kajian ini yang akan dibahas adalah mengenai pers dalam artian sempit, yang hanya mencakup surat kabar harian.

Surat kabar atau pers dalam arti sempit merupakan alat komunikasi massa yang memberikan kepada lembaga-lembaga komunikasi secara tercetak, lembaga-lembaga yang memenuhi syarat-syarat publisita, periodisita, universalita dan aktualaita. Periodesita pada umumnya berarti satu hari sekali atau beberapa kali dalam sepekan.³ Pada mulanya pers hanya digunakan dalam pengertian media yang

¹ Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT. Triyinc, 1997), hlm. 7-8.

² F. Rachmadi, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), hlm. 9-10.

³ Oey Hong Lee, *Publistik Pers* (Jakarta: Ichtiar, 1965), hlm. 109.

berbentuk cetak saja, disesuaikan dengan arti dari kata *press* yaitu menekan atau mengepres.

Pers berkaitan dengan aktivitas menertibkan sesuatu dengan cara dicetak, Perkembangan pers Indonesia tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia, pers di Indonesia mulai berkembang jauh sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah dipergunakan oleh para pendiri bangsa kita sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan.

Bagi masyarakat pers mempunyai dua kedudukan pertama, merupakan media komunikasi tertua di dunia, kedua, pers sebagai lembaga masyarakat atau institusi sosial yang merupakan bagian integral dari masyarakat dan bukan merupakan unsur asing yang terpisah.⁴ Surat kabar pertama berbahasa Jawa yang diterbitkan bernama *Bromartani* di Surakarta, dan dianggap sebagai perintis dalam pers pribumi.⁵ Pers pribumi memiliki beberapa bahasa yaitu Melayu, Jawa, dan bahasa daerah lainnya yang telah digunakan dalam sejumlah surat kabar,⁶ surat kabar yang telah terbit seperti *Soaro Batak* dan *De Sumatra Post*.⁷

⁴ *Ibid.*

⁵ Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 207.

⁶ Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*. (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hlm. 23.

⁷ Abdurrachman Surjomiharjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Hindia Belanda*. (Jakarta: Departemen Penerangan Republik Hindia Belanda 1980), hlm. 31.

Pers yang telah membuat revolusi komunikasi, antara lain dengan mengubah pola komunikasi tradisional menjadi tertulis sehingga bahasa yang disampaikan lebih baik dan teratur, dalam arti tidak ada perubahan dalam proses penelusurannya pada generasi selanjutnya. Pada 12 Oktober 1960 Presiden Soekarno sebagai penguasa perang tertinggi mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap penerbit mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT). SIT bisa diperoleh jika pers memenuhi persyaratan antara lain loyal terhadap Manipol-Usdek, bersedia mentaati Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No.10 tahun 1960, serta bersedia menandatangani perjanjian pemenuhan kewajiban yang berisi 19 pasal.

Masa Orde Baru yang ditandai dengan jatuhnya pemerintah Presiden Soekarno yang disertai pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia yang kedua menjadikan beberapa surat kabar yang izin terbitnya pernah dilarang oleh Soekarno dapat kembali terbit pada masa kepemimpinan Soeharto. Pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto pers dan media lebih banyak diberikan ruang berpikir dan mengeluarkan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah terdahulu. Prioritas-prioritas yang diberikan oleh pemerintah Orde Baru juga dianggap menciptakan stabilitas sosial dan menumbuhkan kembali perekonomian yang sempat menurun pada masa orde lama.

Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, sehingga informasi dapat diperoleh oleh golongan manapun. Adanya informasi yang terbuka ini semua golongan berhak membaca dan memberikan kritik terhadap apapun tanpa ada intimidasi oleh pemerintah dan posisi monopolistis orang yang berstatus golongan

kelas atas.⁸ Di Jawa Barat pers mengalami perkembangan yang cukup pesat, salah satu media pers yang mengalami perkembangan yaitu Harian Umum Pikiran Rakyat. Harian Umum (HU) Pikiran Rakyat dilahirkan untuk menjadi media yang kritis dan mendomisili di Jawa Barat. Pikiran Rakyat dikelola oleh generasi terbaik pada awal pendiriannya 1950, surat kabar ini diyakini akan terus tumbuh dan berkembang baik sebagai institusi sosial maupun bisnis.

Sejak dikeluarkan dekrit presiden pada tahun 1959 yang mengharuskan media untuk berafiliasi terhadap angkatan bersejata membuat kondisi pers tidak dapat bergerak bebas. Tidak hanya itu, setiap penerbitan media cetak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SIT (Surat Izin Terbit). Adanya peraturan tersebut membuat surat kabar Pikiran Rakyat berhenti untuk sementara pada awal tahun 1966 dikarenakan media pikiran rakyat dianggap tidak berafiliasi kepada Angkatan Bersenjata. Tidak lama setelah itu, pada tanggal 24 Maret 1966 surat kabar Pikiran Rakyat muncul kembali dan bertepatan dengan peringatan ke-20 peristiwa heroik Bandung Lautan Api.

Pada awal tahun 1974, Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting, untuk pertama kalinya perusahaan berhasil melengkapi diri dengan sarana percetakan offset yang dibeli dari fasilitas PMDN dari bantuan BRI. Mesin cetak ini mampu mencetak koran sebanyak 25.000 eksemplar per jam. Sejak tahun itu, peredaran Pikiran Rakyat

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 113.

dapat merambah ke seluruh pelosok Jawa Barat dan memantapkan diri sebagai korannya orang Jawa Barat, sekaligus yang terbesar di provinsi Jawa Barat.

B. KEHIDUPAN PERS SEBELUM ORDE BARU

Tumbuhnya kesadaran Nasional yang berakhir pada perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan bangsa dapat dilacak pada banyak faktor. Tanpa disadari bahwa proses penaklukan dan pendudukan Belanda atas wilayah Indonesia yang luas, yang semula masyarakatnya tercerai-berai mendorong terbentuknya proses pencairan identitas dan integrasi nasional. Awal abad ke-20 terbit *Jong Indie*, yang didirikan oleh Mr. Th. Thomas, seorang ahli hukum di Batavia, yang merintis jalan ke arah tercapainya dasar-dasar politik baru.⁹ Kemudian kantor berita ANETA menjadi sangat penting, karena surat-surat kabar Belanda semakin lama semakin banyak yang berisi berita-berita dari telegram, meskipun biaya telegram saat itu sangat mahal.¹⁰

Kesejahteraan hidup dan meningkatkan status seseorang menuntut perubahan gaya hidup, antara lain berupa gaya hidup baru, seperti penggunaan bahasa, cara berpakaian, cara makan, kelengkapan alat perabot rumah tangga, mata pencarian

⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁰ I. Taufik, *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Triyinc, 1977), hlm. 22-23.

hidup, kesenian, kepercayaan, menghargai waktu, termasuk munculnya media cetak sebagai bagian dari media komunikasi.¹¹

Pers di awal kemerdekaan dimulai pada saat jaman Jepang, dengan munculnya ide bahwa beberapa surat kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa surat kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di Padang Nippo (Melayu), dan Sumatera Shimbun (Jepang-Kanji). Kegiatan penting mengenai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, sejak persiapan sampai pencetus Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejumlah wartawan pejuang dan pejuang wartawan turut aktif terlibat di dalamnya.

Perjuangan para wartawan untuk ikut menegakkan kemerdekaan Indonesia pada waktu sangat nyata. Dalam tekanan pemerintah Jepang yang tidak mau melepaskan Indonesia merdeka dan Belanda yang membonceng Sekutu untuk kembali menancapkan kekuasaannya maka pers Indonesia pada waktu itu berdiri dibelakang kaum republikein menyokong terus menyuarakan kemerdekaan Indonesia sehingga orang menyebut pers republikein. Untuk menandingi tulisan-tulisan yang termuat pada koran republikein Belanda membuat koran tandingan diantaranya *De Courant* (Bandung), *De Locomotief* (Semarang), *Java Bode* (Jakarta).¹²

¹¹ Djoko Soekiman, “Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya (Abad XVIII sampai Medio Abad XX)”, *Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996), hlm. 20.

¹² Abdurrahman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Bhratara, 2002), hlm. 39-40.

Saat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa pindah ke Yogyakarta dan kemudian Yogyakarta menjadi ibukota Republik Indonesia para wartawan pun juga banyak yang ikut pindah ke Yogyakarta. Ketika ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta itulah tanggal 9 Februari 1946 para wartawan berkumpul di gedung Sociteit atau Sasono Suko Solo (Sekarang Monumen Pers Nasional) mendirikan organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pers di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang Belanda telah berjasa memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Setelah mesin cetak tiba di Indonesia pemerintah kolonial Belanda mengintruksikan kepada para pegawainya untuk menerbitkan surat kabar. Namun, surat kabar yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda tidak dapat bertahan, karena penerbitan pada masa itu. Pada awal abad ke-20 ditandai oleh adanya fenomena pertumbuhan gagasan dan gerakan nasionalisme di Indonesia.

C. BERDIRINYA SURAT KABAR PIKIRAN RAKYAT DI BANDUNG

Membahas sejarah kelahiran dan pertumbuhan surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung akan menemukan fenomena menarik karena dua hal. Pertama, surat kabar Pikiran Rakyat yang pertama kali terbit pada tanggal 30 Mei 1950 di Bandung ternyata berbeda dengan surat kabar yang sekarang dikenal dan mulai terbit tanggal 24 Maret 1966. Kedua, karena perbedaan yang pertama itu maka berbeda pula visi

dan jati diri dari surat kabar Pikiran Rakyat di Bandung itu pada periode 1951-1965 dan 1966-sekarang.

Kelahiran surat kabar Pikiran Rakyat (selanjutnya disingkat PR) fase pertama, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari usaha visi pribadi Djamal Ali sebagai pemimpin umum Pikiran Rakyat. Sebagai jurnalis kawakan yang telah memimpin surat kabar Boeroeh di Yogyakarta pada masa revolusi Indonesia, visi dan ideologi Djamal Ali nampaknya bersifat nasionalis dan agak kekiri-kirian (walaupun bukan komunis). Citra nasionalis Pikiran Rakyat semakin kental oleh visi yang dibangun oleh Pemimpin Redaksinya, Asmara Hadi. Sebagai menantu Presiden Soekarno, lewat perkawinannya dengan Ratna Juwaimi, Asmara Hadi memang seorang jurnalis yang sangat dipengaruhi oleh ideologi PNI (Partai Nasional Indonesia). Duet Djamal Ali dan Asmara Hadi itu telah menjadikan PR sebagai pers yang nasionalis secara ideologis, walaupun Pikiran Rakyat bukan pers corong dari PNI di satu sisi, dan pers yang Soekarnoisme dalam arti mendukung dan membela kebijakan politik Soekarno, termasuk ajaran-ajarannya.

D. DINAMIKA DALAM PERKEMBANGAN SURAT KABAR PIKIRAN RAKYAT PADA AWAL ORDE BARU

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru bukanlah masa yang mudah. Sejak hari pertama setelah G30S/PKI pendulu politik dengan cepat bergerak ke arah yang berlawanan. Sementara rakyat menghendaki perubahan berlangsung cepat, pemimpin

Orde Baru yang diharapkan, yaitu Soeharto, menolak untuk mengambil alih kepemimpinan nasional dari Soekarno.¹³

Pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965.¹⁴ Pada periode 1966-1980 dapat dikatakan sebagai tahap konsolidasi Orde Baru dan Soeharto dalam upaya menggulingkan posisi Soekarno. Soeharto muncul sebagai aktor yang cukup berperan dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa 1965. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia sejak tahun 1966. Sejarah kekuasaan Orde Baru yang panjang telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai tokoh yang dipuja dan diakui seiring prestasi pembangunan ekonomi yang juga telah diukirnya.¹⁵

Jika melihat perkembangannya, tampak bahwa pers pada umumnya berusaha terus hidup di tengah pasang surut perkembangan masyarakat luas. Pikiran Rakyat sudah memenuhi fungsi pers, namun perlu kita ketahui bahwa salah satu fungsi pers yaitu melakukan kontrol sosial tidak dapat dijalankan dengan baik pada masa Orde Baru. Hampir sama dengan rezim Demokrasi Terpimpin, yang berbeda ialah rezim

¹³ Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama Ke Orde Baru*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 191.

¹⁴ Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1973), hlm. 26

¹⁵ Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 79.

Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar institusi politik yang harus di atur dan di kontrol seperti halnya dengan organisasi massa dan partai politik.¹⁶

Menyusul perubahan status perusahaan, Pikiran Rakyatpun segera menata diri. Nilai-nilai idealisme dan etika jurnalistiknya dipadukan dengan manajemen bisnis layaknya sebuah perusahaan modern. Pada awal tahun 1974 Pikiran Rakyat mencatat peristiwa penting, untuk pertama kalinya perusahaan berhasil melengkapi diri dengan mesinpercetakan offset yang dibeli dari fasilitas Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN) dan bantuan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Mesin cetak ini mampu mencetak koran sebanyak 25.000 eksemplar per jam. Sejak tahun itu Pikiran Rakyat terus melesat mampu melebihi target yang diharapkan, serta berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Pikiran Rakyat kemudian dapat menyebar keseluruh pelosok Jawa Barat dan memantapkan diri sebagai koran masyarakat Jawa Barat, sekaligus yang terbesar di provinsi Jawa Barat sebelumnya, dalam kurun waktu 1967-1973, koran-koran berskala nasional terbitan Jakarta yang mendominasi peredaran koran Jawa Barat.

E. KESIMPULAN

Perjalan Pikiran Rakyat pada awal berdiri 30 Mei 1950-1965 berbeda visi dengan Pikiran Rakyat pada 24 Maret 1966 sampai tahun 1974. Pada tahun 1950-1965 disebut fase I pada masa kepemimpinan Asmara Hadi dan Ratna Juwaimi puteri

¹⁶Eyo Kahya, *Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 120

Soekarno yang membuat Pikiran Rakyat pada masa itu beraliran nasionalis. Pikiran Rakyat mulai 24 Maret 1966 disebut sebagai fase II. Pada fase ini Pikiran Rakyat dipimpin oleh Sakti Alamsyah Siregar (1966-1983) dan berhasil mendapat dukungan dari pemerintah dan militer. Meskipun Pikiran Rakyat sempat berhenti terbit karena terlambat berafiliasi dengan kekuatan politik, namun Pikiran Rakyat dapat bangkit kembali dan pada tanggal 9 April 1973 resmi menjadi PT. Pikiran Rakyat Bandung.

Pada masa Orde Baru, perjalanan Pikiran Rakyat tidaklah mudah, ada beberapa kendala yang dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pikiran Rakyat yaitu terjadi krisis kertas pada tahun 1945-1950, dalam menghadapi hal tersebut Pikiran Rakyat mengganti kualitas kertas menjadi kertas merang dan pastur. Keterbatasan kertas pada tahun 1945-1949 Pikiran Rakyat hanya terbit 1 sampai 2 halaman saja. Namun, pada masa itu Pikiran Rakyat tidak hanya terbit di Bandung tetapi juga sampai merambah keseleruh pelosok Jawa Barat dan menetapkan diri sebagai surat kabar orang Jawa Barat, sekaligus terbesar di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1960

Surat Kabar Pikiran Rakyat Juli 1961.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1962

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1963.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1964.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Januari 1965.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Desember 1966.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Agustus 1968.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Desember 1969.

Surat Kabar Pikiran Rakyat November 1972.

Surat Kabar Pikiran Rakyat Oktober 1973.

Buku

Abdurrahman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: Bhratara, 2002

Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: CSIS, 1973

Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto*, Jakarta: Kompas, 2012

Djoko Soekiman, "Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya (Abad XVIII sampai Medio Abad XX)", *Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996

Edward C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, 1983

Eyo Kahya, *Perbandingan Sistem Dan Kemerdekaan Pers*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004

- F. Rachmadi, *Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990
- I. Taufik, *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta: PT Triyinco, 1977
- Nurani Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Oey Hong Lee, *Publistik Pers* Jakarta: Ichtiar, 1965
- Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra, 1985
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang Transisi Orde Lama Ke Orde Baru*, Jakarta: Kompas, 2008
- Willard A. Hanna, *Hikayat Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988

Skripsi

- Nunung Susanti, “*Perkembangan Pers Mahasiswa: Terhadap Surat Kabar Glora Mahasiswa 1974-1998*”, *Skripsi*, Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2001.
- Toha Putratama, “*Perkembangan Periklanan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Pada Masa Orde Baru 1966-1998*” *Skripsi*, Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2007.
- Widya Fitrianiingsi, *Perempuan Dalam Iklan Media Cetak Di Jawa Pada Masa Kolonial 1900-1942*”, Yogyakarta: *Skripsi*, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM tahun 2008.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Miftahudin, M. Hum
NIP. 19740302 200321 1 006

Reviewer



H.Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum
NIP. 19580121 198601 1 001